

Dr. Ahmadin, S.Pd., M.Pd



SEJARAH POLITIK di **INDONESIA** PASCA ORDE BARU

(Detik-Detik Menjelang Pemilu 2004)



SEJARAH POLITIK di **INDONESIA PASCA ORDE BARU**

(Detik-Detik Menjelang Pemilu 2004)

Dr. Ahmadin, S.Pd., M.Pd



SEJARAH POLITIK DI INDONESIA PASCA ORDE BARU (DETIK-DETIK MENJELANG PEMILU 2004)

Penulis:
Ahmadin

Desain Cover:
Usman Taufik

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Aas Masruroh

ISBN:
978-623-459-315-0

Cetakan Pertama:
Januari, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
Telepon (022) 87355370

PRAKATA PENULIS

Kampanye parpol secara historis telah menjadi tradisi politik yang umum dijumpai baik di Indonesia maupun di negara lain, terutama menjelang masa pemilihan umum. Strategi dan tujuannya berbeda masing-masing parpol berdasarkan visi dan misi, serta seberapa besar peluang yang dimilikinya. Bagi parpol raksasa dan memiliki basis massa pendukung yang banyak, sudah barang tentu targetnya adalah menggolkan elitnya untuk tampil sebagai anggota dewan pada tataran pemilihan legislatif, dan pada level lainnya berusaha memperjuangkan kader terbaiknya untuk menjadi presiden. Sebaliknya, bagi parpol yang masih dalam kategori kecil hanya menargetkan calonnya pada tataran legislatif dan lebih mengandalkan koalisi pada level pemilihan presiden.

Dalam dinamika perpolitikan di Indonesia terutama masa kampanye parpol hingga pemilihan presiden, menunjukkan adanya pergulatan sengit antara elit melalui parpolnya untuk tampil sebagai *top hegemoni*. Demikian optimis dan antusiasnya masing-masing elit politik dalam persaingan tersebut, sehingga beragam cara pun ditempuh mulai dari modus paling elegan yang memukau hingga praktek non etis yang menyebarkan.

Sungguh pergulatan tersebut menyerupai sebuah pagelaran drama, yang dalam aturan mainnya telah diskenariokan sedemikian rupa. Bagaimana mereka bermain, siapa yang bermain serta bagaimana buah dari permainan tersebut itulah yang hendak dideskripsikan secara kronologis dalam buku yang merupakan kumpulan artikel politik ini.

Pada masa awal maraknya kegiatan kampanye dan sosialisasi parpol pada Januari 2004, iklim perpolitikan di Indonesia sempat diselimuti oleh kabut kekhawatiran akan bangkitnya kembali orde baru. Gejala ini muncul sejak tampilnya elit politik tangguh sekaliber Siti Hardianti Rukmana dengan mesin politiknya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Betapa tidak, suasana kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi yang diimpikan sebagai rezim suci dari praktek KKN justru lebih gawat dari orde sebelumnya. Apalagi modus operandi baru pemilihan umum yang

dilaksanakan secara langsung, berbagai kemungkinan tak terduga dapat saja terjadi akibat kesembronoan peserta pemilu.

Untuk mengcounter kemungkinan tersebut, strategi kampanye pun gencar dilakukan dan koalisi parpol dijadikan sebagai solusi cantik dalam persoalan ini. Akibatnya, muncullah elit-elit politik baru mencalonkan diri sebagai pemimpin dengan sejumlah janji muluknya yang belum tentu bisa dibuktikan. Banjir janji pun terjadi di Indonesia terutama di penghujung Maret 2004, dengan pengharapan agar rakyat kecil akan hanyut terbawa arus.

Belum lagi sirna kabut kekhawatiran akan bertahtanya kembali “Dinasti Soeharto”, pada awal hingga penghujung bulan April Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan capres militer. Hal ini terjadi sejak tampilnya SBY dari partai Demokrat dan lolosnya Wiranto dari konvensi Golkar.

Konsekuensi logis dari lahirnya berbagai respon baik kekhawatiran mengenai bangkitnya Dinasti Soeharto, capres militer, ataupun Megawati yang telah dianggap gagal menjalankan agenda reformasi segera mengubah iklim perpolitikan. Jika fenomena yang berkembang sebelumnya adalah aktivitas mempromosikan calon presiden, maka memasuki bulan Mei justru kriteria pemimpin dengan sejumlah superioritas dan kelemahannya menjadi *top wacana*.

Tampaklah pergulatan elit politik tidak etis dan rivalitas tidak sehat ditandai oleh kecenderungan saling menjelek-jelekkan ibarat iklan detergen “pakai daia, lupakan yang lain”. Bahkan tidak tanggung-tanggung ideologi pun dijadikan senjata pamungkas dan racun mematikan untuk meng-cut peluang lawan politiknya. Kondisi inilah yang mendorong saya untuk membuat sebuah tulisan bertajuk persaingan antara dua kubu yakni nasionalisme Islam dan nasionalisme global yang masing-masing “mempunyai niat suci” membawa Indonesia ke iklim yang lebih kondusif.

Pada penghujung bulan Mei dan memasuki bulan Juni, pergulatan elit politik di Indonesia telah memasuki babak adu visi dan misi capres terutama untuk menarik simpati rakyat menjelang pemilihan presiden putaran pertama tanggal 5 Juli 2004. Lima pasang capres dan cawapres yang lolos pun berlaga yakni Wiranto-Salahuddin, Megawati-Hasyim, Amin Rais-Siswono, SBY-JK, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Dalam persaingan

merebut simpati dan dukungan rakyat tersebut, pasangan SBY-JK justru dirongrong oleh dugaan adanya misi Kristenisasi di balik ideologi politiknya.

Meskipun demikian, dari hasil pemilihan presiden putaran pertama realitas menunjukkan bahwa dukungan berdasarkan ikatan emosional justru mengalahkan loyalitas struktural sekaligus strategi koalisi. Tampilah pasangan Mega-Hasyim dan SBY-JK sebagai pemenang yang secara otomatis akan berlaga pada pilpres putaran kedua 20 September. Perubahan peta perpolitikan ini, pada gilirannya membuat kembali sebuah perubahan kondisi dimana golongan putih (golput) sebagai sikap menggunakan hak pilih yakni memilih untuk tidak memilih menjadi tendensi.

Fenomena perpolitikan ini, disebabkan oleh adanya kekecewaan pihak-pihak tertentu atas hasil pemilu mengenai figur yang akan tampil sebagai presiden. Serentak dengan itu, lahirlah pertanyaan apakah demokrasi itu memang ada atau hanya sebuah mitos yang tidak akan pernah dimengerti oleh rakyat. Melalui cara koalisi untuk menggalang dukungan, terkesan bahwa substansi demokrasi di Indonesia itu adalah “dari parpol, oleh parpol dan untuk parpol”.

Bahkan di tengah maraknya kecenderungan golput tersebut, Tokoh agama ternama sekaliber KH. Zainuddin MZ yang saat itu “sengaja” menceburkan diri dalam “lumpur politik”, pernah mengeluarkan suatu statement yang terkesan cukup “emosional” menurut pihak tertentu atau memang ada benarnya juga bahwa umat Islam saat ini ibarat tengah dihadapkan pada dua pilihan makanan yakni sate babi dan sate anjing. Karena itu, menurutnya wajar jika ada yang makan karena terpaksa dan ada pula yang tidak mau makan.

Sekitar satu bulan lebih menjelang pemilihan presiden putaran kedua, dalam pergulatan elit politik di Indonesia kembali diramaikan oleh munculnya koalisi elit politik bernama “Koalisi Kebangsaan” yang melahirkan kondisi pro dan kontra. Bahkan perilaku elit politik yang berjuang mengatasnamakan rakyat padahal justru hanya sebuah strategi berbagi kekuasaan (*power sharing*), dinilai sebagai tindakan perampasan atas hak demokrasi rakyat.

Kalah dan menang itulah resiko dari sebuah pertandingan dan hanya orang yang berjiwa besarlah yang mampu bersikap sportif. Siapapun yang terpilih sebagai presiden itu adalah hasil suara rakyat, dan bukankah Indonesia ini juga adalah milik rakyat?.

Berbagai kondisi perpolitikan di Indonesia sejak masa kampanye parpol hingga pemilihan presiden yang diuraikan secara kronologis berikut ini, diberi judul “Sejarah Politik di Indonesia Pasca Orde Baru” tidak berarti akan basi setelah pemilihan presiden berlalu. Artikel yang sengaja dihimpun ini, setidaknya akan menjadi sebuah *collective memory* atau informasi hingga kapan pun mengenai kondisi politik di Indonesia selama kurun waktu kampanye pemilu 2004. Bahkan menjelaskan kepada kita mengenai kondisi pendukung dan alasan rasional mengapa SBY-JK tampil sebagai pemenang pemilu.

Penjiwaan secara historis-imajinatif atas buku ini akan mengantarkan anda ke suatu suasana politik yang khas terutama dalam sistem Pemilu langsung yang baru diterapkan di Indonesia di antara multipartai. Bahkan dapat menjadi pelajaran bermakna bagi para elit dan praktisi politik, dalam upaya menggolkan figur andalannya pada periode Pemilu di masa mendatang.

Akhirul kalam, “tidak ada permusuhan yang abadi, tidak ada persekutuan yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan”, kira-kira seperti itulah pergulatan elit yang dipertontonkan dalam panggung politik di Indonesia.

Makassar, 12 Nopember 2022

Ahmadin

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	iii
DAFTAR ISI	vii
- Gejala Kebangkitan Orde Baru	1
- Banjir Janji di Indonesia: <i>Perlukah Sebuah New Social Contract</i>	5
- Kebangkitan “Dinasti Soeharto”: Fenomena Ironis atau Keharusan Sejarah	9
- Capres Militer Dalam Wacana Civil Society	13
- Kriteria Pemimpin Dalam Perspektif Islam: Siapakah yang Pantas Jadi Presiden	17
- Nasionalisme Islam Vs Nasionalisme Global: Potret Dinamika Pemikiran Politik di Indonesia	21
- Apa Kabar Syari’at Islam?: Agenda Tersisa dari Visi Misi Capres ..	25
- Membaca Peluang Para Capres	31
- Peluang SBY-JK di Tengah Maraknya Gugatan	37
- Membangun Pemikiran Politik Bernafaskan Islam	41
- Koalisi Parpol Vs Ikatan Emosional	47
- Fenomena Golput dalam Pilpres Putaran Kedua: Potret Buram Pendidikan Demokrasi	51
- Mitos Demokrasi: Potret Dinamika Perpolitikan di Indonesia	55
- Tokoh Agama dalam Panggung Politik: Antara Aspirasi Umat dan Pencorengan Citra	61
- Koalisi Elit Politik: Merampas Hak Demokrasi Rakyat	67
- Mega-SBY Adu Jurus Pamungkas	73
DAFTAR PUSTAKA	75
PROFIL PENULIS	76

GEJALA KEBANGKITAN ORDE BARU

Impian para “reformis” untuk membersihkan sistem pemerintahan Indonesia dari praktek KKN, rupanya pupus dan gagal di tengah jalan ibarat pepatah lama “layu sebelum berkembang”. Kegagalan inilah yang dikhawatirkan akan membuka peluang bagi Mbak Tutut kala itu apalagi didukung oleh perubahan pola pikir rakyat dan berbalik mengagumi kepemimpinan Soeharto dulu.

Siapa calon pemimpin bangsa yang paling ideal untuk tampil menahkodai pembangunan Indonesia di masa mendatang, itulah salah satu wacana menarik di tengah kian memanasnya iklim politik menjelang pemilu 2004. Masing-masing partai politik sibuk dengan berbagai strategi untuk menggolkan figur favoritnya, dengan visi misi dan cita-cita yang katanya atas nama rakyat. Demikian pentingnya menemukan figur yang diharapkan mampu mengubah wajah perekonomian Indonesia ke bentuk yang lebih baik, sehingga diskusi pun digelar mulai dari forum yang resmi hingga ke warung kopi yang tidak formal.

Di tengah ramainya persaingan merebut kursi kepresidenan, ada fenomena menarik dan sempat menjadi top wacana yakni kemungkinan bangkitnya orde baru jilid II. Gejala kebangkitan kembali orde yang selama ini dicaci maki dan dicemooh sebagai penyebab ambruknya sendi-sendi perekonomian negara, setidaknya dianggap sebagai *bottle-neck* bagi kans Megawati untuk tampil sebagai presiden dalam kesempatan kedua. Bahkan bukan hanya Mega yang dijagokan oleh PDI-P yang terancam gagal menduduki kursi kepresidenan, tetapi figur andalan Partai Amanat Nasional (PAN) Amin Rais pun diprediksikan kalah dalam bersaing pada waktu itu.

Kekhawatiran akan fenomena kebangkitan orde baru sebagai rival kuat yang patut diperhitungkan, muncul sejak lahirnya partai politik bernama Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang menjagokan Siti

BANJIR JANJI DI INDONESIA: PERLUKAH SEBUAH NEW SOCIAL CONTRACT

Jean Jacques Rousseau sang penulis buku *“The Contract Social”* (1762), pernah mengintrodusir sebuah konsep *“civil religion”* sebagai *condition sine qua non* untuk menciptakan kepatuhan rakyat terhadap penguasa politik. Melalui tulisannya yang termuat dalam buku IV bab 8 dijelaskan bahwa : *“civil religion is a profession of faith which is purely civil and of which it is the soveriegn’s function to determine the articles, not strictly as religious dogma, but as sentiments of sociability, without which it is impossible to be either a good...”*.

Statement yang dilansir oleh Rousseau tersebut, mengisyaratkan pentingnya sesuatu yang akan menjadikan rakyat bersatu dan percaya pada penguasa yang disebutnya *soverign*. Dalam konteks kehidupan modern sekarang, konsep ini sepadan dengan istilah ideologi. Dalam pengertian lain bahwa kesamaan ideologi yang dianut oleh penguasa dengan rakyat akan berfungsi sebagai senjata ampuh untuk menghadapi setiap persoalan negara yang akan muncul. Selain itu, terciptanya *diffuse support* yang lahir dari sikap patuh rakyat kepada penguasa dapat dipastikan akan menjadi tali simpul bagi terwujudnya integrasi nasional yang permanen.

Ideologi pemersatu sebagai prasyarat terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis tersebut, sesungguhnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaan. Dasar negara Pancasila yang sarat akan makna filosofis yang dinobatkan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan semboyan pemersatu *“Bhineka Tunggal Ika”*, merupakan bukti historis bahwa negara dibangun atas dasar perjuangan dan konsensus bersama.

KEBANGKITAN “DINASTI” SOEHARTO: FENOMENA IRONIS ATAU KEHARUSAN SEJARAH

Kehadiran Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dalam panggung politik di Indonesia menjelang Pemilu 2004, setidaknya sempat menyita perhatian banyak orang bahkan menimbulkan kecurigaan bercampur kekhawatiran. Betapa tidak, pencalonan Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut sebagai presiden Republik Indonesia periode mendatang akan dianggap sebagai awal dari kebangkitan “Dinasti Soeharto”. Benarkah dinasti ini akan bangkit dan bakal kembali menahkodai pemerintahan atau sebaliknya hanya merupakan sebuah gerakan politik yang apologik untuk sekadar menunjukkan kepada semua orang bahwa pendukung mantan penguasa orde baru ini masih banyak mulai dari Sabang sampai Marauke. Begitulah bentuk kekhawatiran hingga sempat menimbulkan debaran jantung di antara para rival politiknya.

Untuk memberi hipotesa atas sejumlah pertanyaan yang muncul dari adanya kekhawatiran akan lahirnya kembali orde baru jilid II, maka mengevaluasi kekuatan dan peluang merupakan hal yang paling fundamental. Mengkaji peta kekuatan dan peluang putri mantan “bapak pembangunan” ini untuk tampil di singgasana kepresidenan, dihubungkan dengan tiga modal utama yang dimiliki. Dalam versi pengamat politik Arbi Sanit (Fajar/05/01/2004) bahwa keunggulan pertama dari putri Soeharto ini yakni pengalamannya dalam kancah politik beberapa puluh tahun lamanya, membuat ia kenyang dengan pengalaman.

Superioritas kedua yakni parpol yang menjagokannya memiliki jaringan organisasi yang luas, ditandai prestasi parpol yang hanya dalam waktu enam bulan telah mampu menyiapkan semua daerah dan langsung lolos dalam pemilu 2004. Kemudian kelebihan ketiga yakni PKPB mempunyai SDM yang lebih baik dibandingkan PDI-P yang menjagokan Mega. Bahkan kelebihan lainnya yang tidak kalah penting yakni dana yang

CAPRES MILITER DALAM WACANA CIVIL SOCIETY

Haruskah bangsa ini alergi dengan figur militer dan khawatir akan lahir rezim otoritarian jilid II?. Benarkah kekhawatiran itu adalah murni dari rakyat atau sebaliknya hanya sebuah perilaku tidak sportif dari pihak yang kalah dalam pemilu dengan sejumlah kepentingan kelompoknya? Lalu bagaimana pula dengan pasangan calon militer dan sipil, apakah tidak justru sudah representatif dan merupakan sebuah kolaborasi pas serta kekuatan yang handal?

Siapa gerangan figur yang paling pantas dan memenuhi syarat untuk tampil sebagai presiden RI periode mendatang, itulah isu paling santer diperbincangkan pada April 2004. Diskusi mengenai kriteria calon presiden dan wakil presiden tersebut, tidak hanya digelar melalui forum secara resmi oleh para elit politik dan kaum cerdik pandai tetapi juga berlangsung di berbagai lapisan masyarakat hingga ke “level paling bawah”. Fenomena ini menunjukkan bahwa betapa tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masa depan bangsanya.

Demikian hangatnya diskusi mengenai hal ini, sehingga perdebatan pun akhirnya tiba pada tataran pertimbangan ideologi dan doktrin politik yang kemungkinan dianut oleh calon yang bersangkutan. Dalam pandangan banyak orang, ideologi dan doktrin politik akan sangat mempengaruhi warna tipe kepemimpinan dan sistem pemerintahan sehingga membutuhkan pertimbangan yang lebih matang. Karena itu, dalam perjalanan menciptakan kondisi masyarakat madani (*civil society*) sebagai salah satu agenda penting dari reformasi, menyebabkan rencana pencalonan figur dari kalangan militer pada pemilihan umum tahap kedua 5 Juli menjadi *top wacana*.

KRITERIA PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF AJARAN ISLAM: SIAPAKAH YANG PANTAS JADI PRESIDEN

Pemikir Islam ternama sekaliber al-Mawardi sang penulis buku “*Al-ahkam al-Sulthaniyah*” (peraturan-peraturan kerajaan/pemerintahan), pernah mengintrodusir tentang kriteria pemimpin (*imamah*). Kriteria *Ahl al-Imamah* atau mereka yang berhak menjadi pemimpin, adalah mereka yang memenuhi tujuh syarat utama yakni (1) sikap adil dengan segala persyaratannya, (2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad, (3) sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya, (4) utuh anggota tubuhnya, (5) wawasan yang memadai untuk mengatur rakyat dan mengelola kepentingan umum, (6) keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat, dan (7) keturunan Qurais.

Beberapa kriteria pemimpin yang dilansir oleh tokoh terkemuka mazhab Syafi'i ini, pada dasarnya sangat menarik untuk dihubungkan dengan kondisi perpolitikan di Indonesia terutama menjelang pemilihan presiden. Tatkala rakyat Indonesia tengah dihadapkan pada kebingungan memilih figur yang pantas menjadi presiden, tampillah kemudian upaya para *ruling elit* sibuk mempromosikan bakal calon yang dijagokan untuk menahkodai kepemimpinan Indonesia di masa mendatang. Bahkan tidak jarang dalam rivalitas merebut simpati rakyat tersebut, antara kubu saling menjelekkan dan menganggap dari kalangan mereka lebih pantas sehingga tampak bak perang dingin.

Kenyataan itu terbukti ditandai oleh adanya dua kekuatan besar yang bersaing yakni kelompok pendukung capres militer dan capres sipil. Ironisnya karena para pendukung capres sipil menganggap bahwa untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, Indonesia tidak boleh dipimpin oleh militer dengan anggapan tidak akan banyak berbeda dengan

NASIONALISME ISLAM VS NASIONALISME GLOBAL: POTRET DINAMIKA PEMIKIRAN POLITIK DI INDONESIA

Herbert Feith sang penulis buku “The Decline of Constitutional Democratie in Indonesia” (1962) pernah menjelaskan tentang lima aliran politik di Indonesia yang selalu bersaing merebut hegemoni. Aliran politik tersebut antara lain Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis dan Komunisme.

Pada masa pemerintahan orde baru di bawah komando Soeharto, kelima aliran ini menjelma dalam tiga partai politik yakni Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang mewakili nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa dan Sosialisme demokrasi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili aliran politik Islam dan komunisme sendiri tidak punya wadah.

Dalam perkembangan dinamika pemikiran politik selanjutnya, menurut versi Cosmas Batu Bara (Kompas 26/03/2004) bahwa aliran itu dirampingkan menjadi tiga yakni aliran pemikiran berwawasan kebangsaan, sosialisme demokrasi dan pemikiran Islam. Orientasi pemikiran politik yang pertama menekankan perhatian pada pengakuan kemajemukan, mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aliran pemikiran politik kedua menekankan perhatian pada pengembangan demokrasi dalam arti yang seluas-luasnya atau dalam istilah lain mensosialisasikan demokrasi, bahkan lebih jauh pemikiran sosial ekonomi juga inklusif di dalamnya. Sementara itu, aliran pemikiran politik Islam yang tetap eksis sejak 1945 hingga sekarang selalu berjuang mempertahankan wadah bagi orang Islam. Meskipun demikian, lalu terbagi dua orientasi yakni ada pihak yang murni mempertahankan wadah

APA KHABAR SYARI'AT ISLAM?: AGENDA TERSISA DARI VISI MISI CAPRES

Apa khabar Syari'at Islam, demikian kira-kira sapaan paling syahdu dan tepat untuk para calon pemimpin bangsa (capres) serta calon wakilnya (cawapres) yang saat ini tengah sibuk berkampanye dengan sejumlah janji politik. Bahkan sapaan bernuansa religius ini, juga tidak salah kiranya jika diarahkan pada para pejuang penegakan Syari'at Islam yang saat ini kelihatan tidak sibuk lagi dengan sejumlah tuntutan nya.

Singkatnya, para capres dan calon wakilnya proaktif mempromosikan diri untuk menjangkau massa pendukung dengan memikirkan “kekuasaan” serta mengatasmakan kepentingan rakyat. Sebaliknya, para pejuang gerakan Syari'at Islam justru terkesan “*vacuum of system*” tanpa melakukan aksi seperti ketika timbulnya keinginan dahulu agar aspek sosial dari ajaran Islam ini dimasukkan kembali ke konstitusi negara. Lalu seperti apa visi misi capres dan cawapres tersebut serta apa pula hubungannya dengan penegakan syari'at Islam?

Kelima pasang figur yang dijagokan memimpin bangsa Indonesia di masa mendatang tersebut, sepertinya telah representatif dan cukup ideal berdasarkan aspirasi rakyat. Jika inti persoalan dari keterpurukan bangsa selama ini dianggap berasal dari kasus korupsi dan lemahnya penegakan hukum, maka ada figur yang siap dan berjanji untuk memberantas itu bahkan dengan hukuman mati. Hal ini didasarkan atas janji politik yang dikemukakan oleh pasangan Wiranto dan Salahuddin.

Bagi mereka yang menganggap bahwa masalah yang paling mendasar dari bangsa Indonesia saat ini adalah kemiskinan dan pendidikan, maka pasangan Mega-Hasyim mengutarakan janji politiknya yakni pengurangan tingkat kemiskinan sebesar 45 persen, menciptakan 12,9 juta lapangan kerja baru dan pengangkatan 100.000 guru per tahun. Mengenai masalah

MEMBACA PELUANG PARA CAPRES

*I am Ignorant of what I know I cover my,
eyes thickly with the veils I have pierced*
- Anatole France – (1844-1924)

Statement yang disinyalir oleh Antole France dalam buah penanya “*Penguin Island*” (1933) tersebut, merupakan sebuah ungkapan tentang sulitnya memprediksi masa depan. Ia mengatakan bahwa “saya tidak tahu apa yang saya tahu. Saya menutup mataku rapat-rapat dengan kerudung yang saya bentuk”. Lalu bagaimana dengan prediksi mengenai presiden yang akan terpilih, apakah masalah ini akan terus kita biarkan berada dalam gulita padahal analisa introspektif bisa sedikit memberi sinar atau *illusion of light*.

Dalam pemilihan presiden yang akan digelar 5 Juli 2004, ada lima pasang capres dan cawapres antara lain Wiranto-Salahuddin, Megawati-Hasyim, Amin Rais-Siswono, SBY-JK dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Kelima pasang ini pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama, akan tetapi peluang untuk tampil sebagai orang nomor satu dan nomor dua RI sepertinya sulit diprediksi. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa masing-masing figur yang dicalonkan, mempunyai superioritas sekaligus kelemahan. Karena itu, strategi yang dianggap paling efektif untuk menjangkau massa pendukung sebanyak mungkin, maka dibentuklah tim sukses di berbagai kota dan provinsi serta seterusnya.

Keinginan kuat untuk menarik simpati rakyat dalam kampanye pemilihan presiden yang dimulai sejak 1 Juni lalu hingga 1 Juli 2004, pada gilirannya menyebabkan munculnya organisasi dadakan (instant) bak cendawan di musim hujan. Sebut saja Forum Petani telah dideklarasikan di Jawa Tengah untuk memberi dukungan terhadap pasangan Wiranto-Gus Solah, yang diperkirakan jaringannya telah meluas ke seluruh Indonesia. Nama organisasi lain yang terkesan lucu yakni Warung Wiranto yang

PELUANG SBY-JK DI TENGAH MARAKNYA GUGATAN

Dalam kampanye menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 5 Juli 2004, nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Yusuf Kalla (JK) sempat populer sebagai pasangan ideal untuk menahkodai kepemimpinan Indonesia ke depan. Kepercayaan berbagai kalangan masyarakat ini didorong oleh anggapan bahwa dilihat sudut *track-record* yang dimiliki, tokoh dari partai demokrat ini dinilai belum pernah tercatat mempunyai keterkaitan dengan kasus pelanggaran HAM.

Jusuf Kalla sendiri menjadi populer terutama karena kepiawaian beliau dalam upaya penanganan beberapa kasus konflik, yang akhirnya diberi julukan sebagai juru damai. Bahkan pasangan ini dianggap sebagai kolaborasi pas dan representatif untuk mewakili Jawa (Indonesia bagian barat) dan Sulawesi (Indonesia bagian timur).

Mengapa harus ada kata Jawa dan Sulawesi yang dijadikan bahan pertimbangan, padahal Indonesia ini adalah satu dari Sabang hingga Marauke. Yah, itu adalah konsep negara Indonesia yang terdiri atas beberapa pulau dan dihuni oleh ragam etnis, akan tetapi dalam realitasnya pernah muncul anggapan bahwa Indonesia hanya milik orang Jawa.

Hal ini ditandai oleh sistem pemerintahan yang sentralistik dan distribusi pembangunan yang tidak seimbang. Lalu jabatan penting di pemerintahan pada umumnya dijabat oleh orang Jawa dan bahkan katanya presiden pun harus orang Jawa. Lahirlah kemudian gerakan menuntut Sulawesi merdeka beberapa tahun lalu, sebagai respon atas anggapan-anggapan tersebut.

Meskipun demikian, anggapan itu lalu pupus perlahan tatkala tampilnya B.J. Habibie sebagai Presiden RI dan dilibatkannya beberapa tokoh penting asal Sulsel dalam kabinet. Seiring dengan itu, otonomi daerah yang digulirkan sekaligus perubahan sistem pemerintahan dari

MEMBANGUN PEMIKIRAN POLITIK BERNAFASKAN ISLAM

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, Islam dan politik merupakan dua sisi dari satu realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan. Lihatlah misalnya ketika Bernard Lewis menulis sebuah buku berjudul *“The Political Language of Islam”* (1988), yang membahas tentang badan politik, hubungan penguasa dan rakyat, perang dan damai serta dilengkapi batas-batas ketaatan.

Tengoklah tatkala pemikir Islam Ibnu Taimiyah mempersembahkan buah penanya berjudul *“Al-Siyasah al-Syar’iyah fi Islah al-Ra’i wa al-Rai’yah”* (1960), yang menceritakan tentang politik berdasarkan syari’ah bagi perbaikan penguasa dan rakyat yang diisitilahkan sebagai penggembala dan gembala. Saksikanlah saat Al-Ghazali pernah membentangkan ide pemikiran politiknya dalam *“Al-Tibr al-Masbuk fi nashihah al-Muluk”* (1987), yang mengulas mengenai batangan logam mulia tentang nasihat untuk raja-raja. Bahkan masih banyak lagi pakar lainnya yang menulis tentang Islam dan politik, sehingga wajar jika dalam literatur tersebut dikenal banyak menggunakan istilah *“siyasah”* atau politik.

Di antara ketiga pakar politik tersebut, pemikiran Ibnu Taimiyah sepertinya yang paling pas untuk dikaji lebih dalam dengan pertimbangan sangat relevan dengan kondisi dan isu-isu politik yang sedang berkembang sekarang. Tokoh ternama ini hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak (moral).

Fenomena ini ditandai oleh kekuasaan pemerintahan Islam tidak lagi berada di tangan khalifah yang bertahta di Bagdad, melainkan pada penguasa-penguasa wilayah atau daerah baik yang bergelar sultan, raja maupun amir. Bahkan dalam kondisi yang tidak menentu itu, para penguasa Islam yang lain termasuk yang berasal dari bangsa Mongol

KOALISI PARPOL VERSUS IKATAN EMOSIONAL

David Easton sang penulis buku “A System Analysis of Political Life” (1967), pernah mengintrodusir sebuah konsep diffuse support untuk menunjukkan dukungan rakyat yang didasarkan atas kepercayaan terhadap penguasa. Kepercayaan rakyat kepada penguasa (pemimpinnya) menurutnya, merupakan modal utama untuk memperkuat kedudukannya sekaligus mengcounter kemungkinan kritik yang mengancam. Karena itu, ideologi dianggap sebagai senjata pamungkas untuk mewujudkan itu sebagaimana konsep *civil religion* yang pernah dipopulerkan oleh Jean Jacques Rousseau dalam buah penanya “*The Social Contract*”.

Dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, konsep tersebut pernah menjadi rujukan atau *the first reference* terutama karena disadari bahwa masyarakat Indonesia tergolong fanatik terhadap sistem keyakinan yang dianutnya. Karena itu, wajar jika pembentukan partai politik berikut penyusunan visi dan misinya selalu didasarkan atas ideologi yang umumnya mengatasmakan agama tertentu. Timbullah kemudian percampuradukan antara urusan agama dan politik demi meraih top hegemoni dalam sistem pemerintahan.

Warna parpol pun semakin nyata sebagai refleksi dari ideologi para pengurusnya dan pada gilirannya melahirkan simpati dan dukungan rakyat kepadanya. Bagi mereka yang berhaluan agamis mendukung parpol yang berciri agama tertentu, sebaliknya pengagum nasionalisme ataupun sosialisme pun memberikan dukungan sekaligus melahirkan aliran pemikiran politik lain.

Hal tersebut dapat dibaca melalui karya Herbert Feith “*The Decline of Constitutional Democratie in Indonesia*” (1962), yang menjelaskan tentang lima aliran politik di Indonesia yang selalu bersaing merebut hegemoni.

FENOMENA GOLPUT DALAM PILPRES

PUTARAN KEDUA: POTRET BURAM

PENDIDIKAN DEMOKRASI

Golput (Golongan Putih) menjelang pilpres putaran kedua, sempat menjadi top wacana di samping isu-isu politik lainnya. Kecenderungan memilih untuk tidak memilih ini, telah menjadi sikap dan prinsip dari orang-orang tertentu baik yang berada pada tingkat elit papan atas, menengah maupun masyarakat level paling bawah.

Penyebabnya pun dipastikan beragam berdasarkan kepentingan maupun harapan individu atau kelompok tertentu, sehingga hal ini diprediksikan akan membawa pengaruh signifikan terhadap jumlah suara atau peserta pemilihan presiden di bulan September. Bahkan ironisnya, golput tersebut seolah “dikampanyekan” oleh figur tertentu yang secara struktural memiliki otoritas dalam organisasi tertentu.

Din Syamsuddin dalam jumpa persnya di Jakarta, pernah menyampaikan bahwa sebanyak sebelas Ormas Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Ormas-ormas Islam, memilih golput pada pemilihan presiden putaran kedua. Ormas tersebut menurut wakil ketua PP Muhammadiyah ini antara lain: Muhammadiyah, Persis, KAHMI, Majelis Dakwah Islamiyah, Dewan Masjid Indonesia, Al-Ittidaiyah, Gerakan Muslimat Indonesia, Wanita Islam Indonesia, Badan Organisasi Wanita Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan KBTII.

Apa yang disampaikan ataupun yang diprediksikan oleh fungsionaris Muhammadiyah yang juga sebagai anggota tim sukses pasangan Amin Rais-Siswono tersebut, secara fundamental sangat menarik untuk dielaborasi lebih dalam terutama jika dihubungkan dengan alasan memilih golput tersebut. Katakanlah Din Syamsuddin misalnya, menjadikan alasan moral, kepentingan Islam, kasus korupsi dan ketergantungan pada negara Asing (adikuasa) sebagai bahan pertimbangan untuk tidak memilih secara

MITOS DEMOKRASI: POTRET DINAMIKA PERPOLITIKAN DI INDONESIA

Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, demikianlah substansi demokrasi sebagaimana asal katanya “demos” (rakyat) dan “kratein” (menguasai atau memerintah).

Terminologi demokrasi perlu dijadikan sebuah diskursus menjelang “pesta demokrasi” di Indonesia yakni pemilihan presiden putaran kedua. Bagaimana awal munculnya dan seperti apa wajah demokrasi di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya merupakan hal yang sangat elementer untuk diketahui. *Ultimate goal* dari upaya tersebut yakni akan diperoleh sebuah perbandingan apakah demokrasi itu memang nyata sifatnya dan benar-benar ada, atau sebaliknya hanya sebuah mitos yang tidak akan pernah dimengerti oleh rakyat.

Terminus ini pertama kali diperkenalkan dan dijadikan sebagai salah satu proses menata kehidupan berbangsa dan bernegara, tatkala revolusi Perancis dikumandangkan oleh kaum proletar di negeri tersebut. Prakondisi yang diperlukan dalam upaya demokratisasi itu, yakni mengaktualisasikan konsep persamaan (*equality*), kebebasan (*liberty*) dan persaudaraan (*relationship*).

Tuntutan tersebut lahir sebagai reaksi terhadap kediktatoran masyarakat ekonomi papan atas, terutama yang berasal dari lingkungan kelas monarki. Untuk mencegah semakin meluasnya efek negatif sistem pemerintahan diktator terhadap masyarakat, maka dalam hubungan antar pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan rakyat sebagai bagian integral dari sistem itu harus terwakili aspirasinya. Tampilah Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya “*l’Esprit des Lois*” membagi kekuasaan negara dalam 3 macam yakni “*pouvoir legislative*” (kekuasaan

TOKOH AGAMA DALAM PANGGUNG POLITIK: ANTARA ASPIRASI UMAT DAN PENCORENGAN CITRA

Telah menjadi kesepakatan umum bahwa eksistensi tokoh agama dalam kehidupan bermasyarakat, sering dianggap sebagai *towering figur* yang memiliki *religious authority* sehingga tampil sebagai panutan. Demikian penting dan berharganya kedudukan yang dimilikinya, sehingga beragam predikat pun disandangnya seperti pemimpin dunia akhirat, suri tauladan, dan aneka superioritas lainnya. Bahkan bagi mereka yang memiliki kadar fanatisme yang berlebihan, cenderung memposisikan tokoh agama sebagai *subject of references* bagi ukuran baku mengenai cara hidup bermasyarakat dengan kompleksitas permasalahannya.

Dalam konteks dan kondisi seperti itu, segala tindakan sebagai manifestasi dari ajaran Al-qur'an dan penjabaran dari As-Sunnah yang dijadikan sebagai *way of life* memiliki *human interest* dan daya pikat yang luar biasa. Karena itu tidak heran jika statement dan kebijakan yang dilakukan seolah bernilai sabda dan umat Islam otomatis pun mengikutinya secara *collective action*. Lalu bagaimana citra, pamor, otoritas dan superioritas lainnya saat ia beranjak meninggalkan habitat menuju panggung politik yang konon identik dengan kepura-puraan, ketidakjujuran dan sejumlah stigma lainnya.

Permasalahan ini menyeruak ke permukaan dan dijadikan sebagai *the part of resources* yang berkembang selama ini, disebabkan oleh timbulnya kecenderungan para tokoh agama tergiur oleh jabatan dan kekuasaan sehingga citra dan kharismanya pun rela dipertaruhkan. Sementara itu, umat yang selalu mengidamkan siraman rohani seolah kehilangan tempat berpijak tampil bak anak ayam kehilangan indungunya. Fenomena ini menarik untuk dicermati lebih jauh, terutama jika dihubungkan dengan untung rugi atau kemungkinan ekses negatif yang ditimbulkan.

KOALISI ELIT POLITIK: MERAMPAS HAK DEMOKRASI RAKYAT

Bila merujuk pada substansinya, maka makna demokrasi dipahami sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Karena itu, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menganut paham demokrasi konsep ini terimplementasikan dalam sebuah proses yang disebut “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Demikian pentingnya kedudukan rakyat sebagai *top hegemony* dalam suatu negara, maka masa depannya yang didesain melalui kegiatan pembangunan di berbagai aspek kehidupan rakyatlah yang mempunyai andil besar. Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa pemegang sah sesungguhnya dari “*political will*” dalam konteks ini adalah segenap rakyat.

Meskipun demikian dalam rangka mewujudkan cita-cita rakyat tersebut, mustahil dilakukan secara parsial (*individual action*) sebaliknya harus dilaksanakan secara bersama-sama (*collective action*). Karena itu, aspirasi rakyat menyangkut pembangunan dan pengembangan negara pada umumnya disalurkan melalui sebuah wadah yang dikenal dengan istilah partai politik (parpol).

Seiring dengan itu, partai politik pun beragam berdasarkan visi dan misinya serta sering menjadikan ideologi sebagai perekat persatuan sesama anggota. Bahkan lebih jauh turut mewarnai berbagai bentuk kebijakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita politik yang didambakannya.

Jika dihubungkan antara konsep demokrasi dan aspirasi rakyat di Indonesia dengan parpol sebagai alat penyaluran, sepertinya sangat jauh dari wilayah substansinya ibarat ungkapan lama “bagai api jauh dari panggang”. Kenyataan ini terbukti sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia, kecenderungan yang tampak hanyalah memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, demokrasi dalam tataran

MEGA-SBY ADU JURUS PAMUNGKAS

Ibarat sepasang pemain kung fu yang telah mengandalkan kemampuan masing-masing untuk berlaga, Mega dan SBY menjelang pilpres putaran kedua tampak giat memperlengkap jurus andalannya dengan pengharapan akan dapat digunakan untuk mengalahkan saingannya. Katakanlah Mega dari “perguruan” PDI-P dengan jurus pamungkasnya bernama “Koalisi Kebangsaan”, telah mengadakan persiapan dengan menjadikan beberapa parpol sebagai koleganya.

Para elit politik pun lalu menggagas sebuah model “pembagian kursi (kekuasaan)” yang dibungkus dengan dalih “koalisi kebangsaan”. Tampillah Akbar Tanjung mengomandoi koalisi ini untuk memenangkan pasangan Mega-Hasyim dalam pilpres putaran kedua 20 September. Ide ini didasarkan atas alasan bahwa saat ini presiden Megawati dan wakilnya Hamzah Haz sibuk dengan urusan kenegaraan. Selain itu, partai lainnya yang tergabung dalam “koalisi kebangsaan” yakni PPP, PDS dan PDI-P sendiri.

Loncatan para elit politik (koalisi kebangsaan) tersebut, jika dianalisis rupanya menyisakan pertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Apa motif dari koalisi tersebut serta apa pula bentuk imbalan yang akan diterima setelah calon yang dijagokannya tampil sebagai pemenang, kira-kira demikian pertanyaan yang paling pas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu saja siapapun akan mampu menerka dan kira-kira jawabannya pun cukup enteng yakni “*power sharing*” (pembagian kekuasaan) dalam penyusunan kabinet.

Memperhatikan kecenderungan berkoalisi tersebut, sungguh sangat ironis di era pemilihan langsung yang katanya akan mengembalikan hak demokrasi rakyat. Betapa tidak, hasil perolehan suara sekaligus mencerminkan dukungan rakyat atas figur tertentu sebagai aspirasi murni dari rakyat rupanya belum final. Pada tingkat elit persekongkolan masih

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadin. "Fenomena Kebangkitan Orde Baru" dalam *Harian Pedoman Rakyat*. 20 Januari 2004.
- "Banjir Janji di Indonesia : Perlukah Sebuah New Social Contract" dalam *Harian Pedoman Rakyat*. 30 Maret 2004.
- "Kebangkitan Dinasti Soeharto : Fenomena Ironis atau Keharusan Sejarah" dalam *Harian Pedoman Rakyat*. 06 April 2004.
- "Capres Militer Dalam Wacana Civil Society" dalam *Harian Pedoman Rakyat*. 30 April 2004.
- "Kriteria Pemimpin Dalam Perspektif Islam: Siapakah yang Pantas Jadi Presiden" dalam *Harian Pedoman Rakyat*. 25 Mei 2004.
- "Nasionalisme Islam Vs Nasionalisme Global : Dinamika Pemikiran Politik di Indonesia" dalam *Harian Fajar*. 28 Mei 2004.
- "Apa Kabar Syari'at Islam : Agenda Tersisa dari Visi Misi Capres" dalam *Harian Fajar*. 11 Juni 2004.
- "Membaca Peluang Para Capres" dalam *Harian Pedoman Rakyat*. 11 Juni 2004.
- "Peluang SBY-MJK di Tengah Maraknya Gugatan" dalam *Harian Pedoman Rakyat*. 22 Juni 2004.
- "Membangun Pemikiran Politik Bernapaskan Islam" dalam *Harian Fajar*. 12 Juli 2004 dan *Harian Pedoman Rakyat*. 15 Juli 2004.
- "Koalisi Parpol Vs Ikatan Emosional" dalam *Harian Fajar*. 26 Juli 2004.
- "Fenomena Golput dalam Pilpres Putaran Kedua" dalam *Harian Pedoman Rakyat*. 27 Juli 2004.
- "Mitos Demokrasi : Potret Dinamika Perpolitikan di Indonesia" dalam *Harian Fajar*. 09 Agustus 2004.
- "Tokoh Agama dalam Panggung Politik : Antara Aspirasi Umat dan Pencorengan Citra" dalam *Harian Pedoman Rakyat*. 12 Agustus 2004.
- "Koalisi Elit Politik: Perampasan Atas Hak Demokrasi Rakyat" dalam *Harian Pedoman Rakyat*. 8 September 2004.

PROFIL PENULIS

Dr. Ahmadin, S.Pd., M.Pd



Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H) Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Program Pascasarjana (S2) pada perguruan tinggi yang sama. Menyelesaikan pendidikan jenjang Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2011) dan menulis disertasi berjudul “Dialektika Ruang dan Proses Produksi Sosial: Studi Sosiologi Pola Pemukiman Etnik di Makassar”. Sebelum

bekerja sebagai dosen tetap, ia pernah menekuni profesi jurnalistik dan menjadi wartawan serta redaktur beberapa majalah dan tabloid di Kota Makassar. Selain itu, ia juga aktif menulis artikel di media cetak dan isi buku ini adalah kumpulan tulisan khusus periode Pemilihan Umum 2004. Sejauh ini ia telah menulis puluhan judul buku bertema sosial, politik, budaya dan sejarah.**

SEJARAH POLITIK di **INDONESIA** PASCA ORDE BARU

(Detik-Detik Menjelang Pemilu 2004)

Dalam dinamika perpolitikan di Indonesia terutama pada masa kampanye parpol hingga pemilihan presiden, menunjukkan adanya pergulatan sengit antara elit melalui parpolnya untuk tampil sebagai top hegemoni. Demikian optimis dan antusiasnya masing-masing elit politik dalam persaingan tersebut, sehingga beragam cara pun ditempuh mulai dari modus paling elegan yang memukau hingga praktek non etis yang menyebalkan. pergulatan tersebut menyerupai sebuah pagelaran drama, yang dalam aturan mainnya telah diskenariokan sedemikian rupa. Bagaimana mereka bermain, siapa yang bermain serta bagaimana buah dari permainan tersebut itulah yang hendak dideskripsikan secara kronologis dalam buku yang merupakan kumpulan artikel politik ini.

Pada masa maraknya awal kegiatan kampanye dan sosialisasi parpol pada Januari 2004, iklim perpolitikan di Indonesia sempat diselimuti oleh kabut kekhawatiran akan bangkitnya kembali orde baru. Gejala ini muncul sejak tampilnya elit politik tangguh sekaliber Siti Hardianti Rukmana dengan mesin politiknya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Betapa tidak, suasana kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi yang diimpikan sebagai rezim suci dari praktek KKN justru lebih gawat dari orde sebelumnya. Apalagi modus operandi baru pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, berbagai kemungkinan tak terduga dapat saja terjadi akibat kesembronoan peserta pemilu.

Fenomena perpolitikan ini, disebabkan oleh adanya kekecewaan pihak-pihak tertentu atas hasil pemilu mengenai figur yang akan tampil sebagai presiden. Serentak dengan itu, lahir pertanyaan apakah demokrasi itu memang ada atau hanya sebuah mitos yang tidak akan pernah dimengerti oleh rakyat. Melalui cara koalisi untuk menggalang dukungan, terkesan bahwa substansi demokrasi di Indonesia itu adalah "dari parpol, oleh parpol dan untuk parpol". Berbagai kondisi perpolitikan di Indonesia sejak masa kampanye parpol hingga pemilihan presiden yang diuraikan secara kronologis berikut ini, diberi judul "Sejarah Politik di Indonesia Pasca Orde Baru" tidak berarti akan basi setelah pemilihan presiden berlalu. Artikel yang sengaja dihimpun ini, setidaknya akan menjadi sebuah collective memory atau informasi hingga kapan pun mengenai kondisi politik di Indonesia selama kurun waktu kampanye pemilu 2004. Bahkan menjelaskan kepada kita mengenai kondisi pendukung dan alasan rasional mengapa SBY-JK tampil sebagai pemenang pemilu.